



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR. 870. 526 /BKPSDM.PDG/2024**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Kota Padang membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang dengan ketentuan pada pengumuman ini.

**I. ALOKASI KEBUTUHAN PNS.**

**A. JUMLAH DAN LOKASI KEBUTUHAN.**

Alokasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) formasi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Formasi	Jumlah Formasi
1	Tenaga Kesehatan	64
2	Tenaga Teknis	428
<b>Jumlah</b>		<b>492</b>

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

## B. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang T.A. 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1	Ahli Pertama - Adyatama Kepariwisataa Dan Ekonomi Kreatif	melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
2	Ahli Pertama - Analisis Hukum	melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
3	Ahli Pertama - Analisis Kebakaran	melaksanakan analisis kebakaran yang meliputi: penyiapan bahan substansi teknis, analisis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebakaran.
4	Ahli Pertama - Analisis Kebencanaan	melaksanakan analisis kebencanaan yang meliputi: penyiapan bahan substansi teknis, analisis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebencanaan.
5	Ahli Pertama - Analisis Ketahanan Pangan	melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
6	Ahli Pertama - Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah	melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.
7	Ahli Pertama - Analisis Pasar Hasil Perikanan	melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
8	Ahli Pertama - Analisis Pasar Hasil Pertanian	melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil pertanian.
9	Ahli Pertama - Analisis Perdagangan	melakukan pembinaan bidang perdagangan, perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
10	Ahli Pertama - Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian	melaksanakan analisis prasarana dan sarana pertanian
11	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	melaksanakan kegiatan analisis administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
12	Ahli Pertama - Arsiparis	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
13	Ahli Pertama - Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	melakukan kegiatan asesmen kompetensi/ potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/ manajemen sumber daya manusia aparatur.
14	Asisten Pelatih Olahraga	melaksanakan pelatihan keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya.
15	Auditor Terampil	melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, evaluasi pengawasan, dan pemeriksaan.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
16	Ahli Pertama - Analisis Pengembangan Kompetensi	melaksanakan analisis di bidang pengembangan kompetensi.
17	Konselor SDM	mendorong untuk mengembangkan potensi ASN, agar dia mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri.
18	Konservator	melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi.
19	Kurator	melaksanakan tanggung jawab melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi museum, setiap museum.
20	Manggala Informatika	melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen keamanan informasi.
21	Ahli Pertama - Mediator Hubungan Industrial	melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.
22	Ahli Pertama - Medik Veteriner	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
23	Operator Alat Berat	memunyai tugas pokok mengoperasikan dan melaksanakan perawatan alat berat.
24	Ahli Pertama - Pamong Budaya	melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.
25	Paramedik Veteriner Terampil	menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
26	Ahli Pertama - Pekerja Sosial	melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut.
27	Ahli Pertama - Pelatih Olahraga	melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada pusat pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa, prima muda, prima utama dan program pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan.
28	Ahli Pertama - Pembina Industri	melakukan pembinaan industri yang meliputi : penyusunan kebijakan, perencanaan program, pembinaan dan pengawasan industri.
29	Ahli Pertama - Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
30	Ahli Pertama - Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman	melaksanakan penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman.
31	Penata Kelola Hukum Dan Perundang-Undangan	melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan.
32	Penata Kelola Kelautan Dan Perikanan	melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan.
33	Penata Kelola Pemerintahan	melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
34	Ahli Pertama - Penata Kelola Penyehatan Lingkungan	melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
35	Ahli Pertama - Penata Kelola Perumahan	melaksanakan kegiatan penatakelolaan perumahan.
36	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi.
37	Ahli Pertama - Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana	melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
38	Penata Keprotokolan	melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah.
39	Penata Laksana Agraria Dan Tata Ruang	melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang.
40	Terampil - Penata Laksana Jalan Dan Jembatan	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.
41	Ahli Pertama - Penata Perizinan	melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
42	Penata Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan	melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
43	Terampil - Penera	melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang uttp, pelaksanaan tera dan tera ulang uttp, pengujian uttp, dan pengelolaan cap tanda tera.
44	Ahli Pertama - Penerjemah	melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti dan penyusunan naskah bahan terjemahan.
45	Ahli Pertama - Pengantar Kerja	melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
46	Ahli Pertama - Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian	melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode Pertanian.
47	Ahli Pertama - Pengawas Benih Tanaman	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu tanaman.
48	Ahli Pertama - Pengawas Koperasi	melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.
49	Ahli Pertama - Pengawas Lingkungan Hidup	melaksanakan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup.
50	Ahli Pertama - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
51	Ahli Pertama - Penggerak Swadaya Masyarakat	melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
52	Ahli Pertama - Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan	melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.
53	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang ahli pertama.
54	Ahli Pertama - Pranata Komputer	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
55	Ahli Pertama - Pustakawan	melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
56	Ahli Pertama - Sandiman	melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
57	Ahli Pertama - Statistisi	melakukan kegiatan statistik.
58	Pemula - Pemadam Kebakaran	melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
59	Teknisi Sarana Dan Prasarana	melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
60	Tenaga Kesehatan	melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
61	Terampil - Arsiparis	melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
62	Terampil - Pranata Komputer	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.
63	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara.
64	Pemula - Penguji Kendaraan Bermotor	Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
65	Terampil - Surveyor Pemetaan	melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan.
66	Polisi Pamong Praja	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
67	Polisi Khusus Cagar Budaya	melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya.
68	Ahli Pertama - Perancang Peraturan Perundang-Undangan	melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
69	Penyusun Materi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan	melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
70	Penyuluh Pertanian	melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian.
71	Ahli Pertama - Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan	melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.
72	Ahli Pertama - Pengembang Kewirausahaan	melakukan pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan pemetaan data dan analisis usaha, konsultasi bisnis dan pendampingan, pengembangan teknologi informasi usaha dan inkubasi wirausaha, pengembangan pembiayaan wirausaha, dan pengembangan ekosistem bisnis.
73	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
74	Ahli Pertama - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	pengelolaan produksi perikanan tangkap yang terdiri atas: persiapan. analisis status dan pengalokasian sumber daya kan. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan.
75	Terampil - Analisis Pasar Hasil Pertanian	melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil pertanian pada jenjang terampil.
76	Ahli Pertama - Peneliti	melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
77	Terampil - Pengawas Bibit ternak	menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, mutu benih, serta pengedaran bibit dan benih.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
78	Ahli Pertama – Pengawas Kemeterologian	Melakukan pengawasan metrologi legal.
79	Pengelola Layanan Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan.
80	Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan	Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan untuk kelangsungan pelestarian lingkungan.
81	Pengendali Konten Internet	menganalisis konten yang diunggah di media sosial pemerintah, memberikan tanggapan atas konten-konten tersebut, serta memantau isu publik di media.
82	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi
83	Penyuluh Lingkungan Hidup	Menyelenggarakan dan/atau melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup.
84	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan, dan pengembangan layanan di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.
85	Pengawas Mutu Pakan	melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
86	Pengelola Keprotokolan	Menyusun acara, menata tempat, mengantar dan menjemput serta mengurus surat-surat izin keluar negeri para pejabat, menyiapkan pengumuman, memeriksa laporan dan memandu kunjungan tamu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
87	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap.
88	Perencana	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan testematis, termasuk mengendalikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan.

## II. PERSYARATAN UMUM PELAMARAN.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia pelamar paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Usia pelamar dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter sub spesialis dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. PPPK dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS dengan syarat yang bersangkutan wajib memenuhi Masa

Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK dan Pyb.

8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
9. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan IPK Minimal, lulusan SMA/SMK Sederajat sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	IPK Minimal/Nilai Ijazah
<b>SMA/SMK Sederajat</b>	<b>7.00 dari skala 10 atau 70.00 dari skala 100.00</b>
<b>D-III</b>	<b>3.00 dari skala 4</b>
<b>S-1 / D-IV</b>	<b>3.00 dari skala 4</b>
<b>S-2</b>	<b>3.20 dari skala 4</b>

10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan :
  - a. Bagi lulusan Sekolah Menengah Atas Sederajat memiliki ijazah yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan / Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
  - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
11. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
13. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP.
15. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
16. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
18. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
19. Pelamar **penyandang disabilitas** dapat melamar pada seleksi PNS dengan ketentuan :
  - a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. pada saat pelamaran, penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
    - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - 2) tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari secara mandiri dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
20. Setiap Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran pada 1 (satu) instansi, 1 (satu) jenis jabatan dan/atau 1 (satu) jenis jalur kebutuhan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
21. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 20 diatas diketahui melamar:

- a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,
- yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **III. TATA CARA PENDAFTARAN.**

Pendaftaran dilakukan secara online dengan alur pendaftaran sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun pada <https://data-sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  - a. Isi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK);
  - b. Isi biodata dan kolom lainnya;
  - c. Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format JPG;
  - d. Cetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar log in ke <https://data-sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Padang dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk scan dokumen asli sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
7. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
8. Simpan data yang telah dicek pada **“form Resume”** dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;

9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.
10. Pelamar melampirkan dokumen persyaratan berupa **scan Dokumen Asli** (bukan foto copy), terlihat jelas dan terbaca dengan jelas serta di **upload melalui portal sscasn** dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi, yang meliputi :
  - a. Swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun;
  - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. Pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6;
  - d. Surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Padang Cq. Kepala BKPSDM Kota Padang dengan memuat jabatan yang dilamar, dibuat pada saat pendaftaran, ditandatangani diatas materai/e-materai Rp.10.000,- sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman;
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau asli Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. Ijazah asli;
  - g. Transkrip Nilai asli;
  - h. Bukti Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  - i. Surat Pernyataan 10 (sepuluh) point yang ditandatangani dan dibubuhi meterai/e-meterai Rp.10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman;
  - j. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan, ditambah dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran dan bukan STR Internship serta linier dengan jabatan yang dilamar. Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - k. Bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan tautan link video (pelamar

dengan kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas);

1. Bagi pelamar jabatan yang mempersyaratkan syarat tambahan, ditambah dengan sertifikasi/dokumen keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- m. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

Dokumen pada huruf i, j, k dan l digabung menjadi satu file lalu diunggah pada '**Dokumen Pendukung Lainnya**'.

#### **IV. TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI**

Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

#### **V. JADWAL SELEKSI**

Jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Jadwal Seleksi CPNS

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

## **VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI**

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 bertempat di Titik Lokasi BKN (untuk lokasi akan disampaikan setelah pengumuman seleksi administrasi).

## **VII. SISTEM KELULUSAN**

1. Seleksi Administrasi
  - a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.
  - b. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN.
  - c. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
  - d. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
  - e. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK.
  - f. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lainnya.
  - g. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan.
  - h. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - i. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
  - j. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan.

- k. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
    - a. SKD menggunakan CAT BKN.
    - b. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
    - c. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
    - d. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
    - e. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
    - f. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar meliputi:
      - 1) tes wawasan kebangsaan;
      - 2) tes intelegensia umum; dan
      - 3) tes karakteristik pribadi.
    - g. Penetapan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud di atas yaitu :
      - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
      - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
      - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
    - h. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh butir soal, dengan rincian :
      - 1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
      - 2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
      - 3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
    - i. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh) dengan rincian :
      - 1) 150 (seratus lima puluh) untuk TWK;
      - 2) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU; dan

- 3) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP.
- j. Penetapan Nilai Ambang Batas pada penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas yaitu :
- 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
  - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- k. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023.
- l. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - 2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - 5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
  - 6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
- m. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
- n. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

- o. Instansi Pemerintah mengumumkan pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 dalam pengumuman hasil seleksi administrasi.
  - p. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
  - q. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
  - r. Dalam hal nilai masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- a. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD mengikuti SKB.
  - b. SKB menggunakan CAT BKN.
  - c. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
  - d. Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.
  - e. Materi SKB untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.
4. Hasil Akhir Seleksi.
- a. Pengolahan hasil integrasi nilai akhir SKD dan SKB sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - 2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).

- b. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
- 1) nilai Kumulatif SKD yang tertinggi;
  - 2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
  - 3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
  - 4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- c. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
  - 2) Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
- d. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan

umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

#### VIII. **KETENTUAN LAIN**

1. Hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui laman <https://bkd.padang.go.id> dan/atau Panitia Seleksi Nasional melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan meterai sebagaimana dimaksud, maka peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
3. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan dokumen/surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah. Panitia Seleksi menyatakan, pelamar penyandang disabilitas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat..
4. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024, akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkd.padang.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id/>.
6. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, panitia dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia seleksi. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
9. Seluruh proses seleksi pengadaan CPSN Pemerintah Kota Padang tidak dipungut biaya apapun.
10. Panitia Seleksi Pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos.
11. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PNS T.A 2024 dapat menghubungi Layanan Helpdesk Panselda Kota Padang :
  - i. Khusus layanan whatsapp 085762804867  
(Senin - Jumat, pukul 08.00-16.30 WIB);
  - ii. Twitter : @Panseldakotapadang.
  - iii. Email : bkpsdmkotapadang@gmail.com
12. Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
13. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil T.A. 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Padang  
Pada tanggal 19 Agustus 2024

 W. WALI KOTA PADANG  
  
**ANDREE HARMADI ALGAMAR**

## LAMPIRAN I

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## A. TENAGA KESEHATAN

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
		64	0			
1	Apoteker Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LUBUK KILANGAN	PROFESI APOTEKER	Memiliki STR
2	Apoteker Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNGUS	PROFESI APOTEKER	Memiliki STR
3	Apoteker Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   APOTEKER	PROFESI APOTEKER	Memiliki STR
4	Apoteker Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ALAI	PROFESI APOTEKER	Memiliki STR
5	Apoteker Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAPAI	PROFESI APOTEKER	Memiliki STR
6	Apoteker Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADANG PASIR	PROFESI APOTEKER	Memiliki STR
7	Asisten Apoteker Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	Memiliki STR
8	Asisten Apoteker Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LUBUK KILANGAN	D-III FARMASI	Memiliki STR
9	Asisten Apoteker Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAUH	D-III FARMASI	Memiliki STR
10	Asisten Apoteker Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD INSTALASI FARMASI	D-III FARMASI	Memiliki STR
11	Asisten Apoteker Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ANAK AIR	D-III FARMASI	Memiliki STR
12	Asisten Penata Anestesi Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPERAWATAN (KONSENTRASI ANESTESI DAN GAWAT DARURAT MEDIK) / D-III KEPERAWATAN ANESTESI / D-III KEPENATAAN ANESTESI	Memiliki STR
13	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Radiologi-Radiologi Intervensional	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS RADIOLOGI KLINIK - RADIOLOGI INTERVENSIONAL	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
14	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah-Kardiologi Intervensi	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH - JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH KARDIOLOGI INTERVENSI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
15	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Kardiiovaskular	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - KARDIOVASKULAR	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
16	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Radiologi-Neuroradiologi dan Kepala Leher	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS RADIOLOGI KLINIK - NEURORADIOLOGI KEPALA LEHER	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
17	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Bedah-Bedah Vaskuler dan Endovaskuler	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS BEDAH - BEDAH VASKULER DAN ENDOVASKULER	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
18	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Neurologi- Neurovaskular, Neurointervensi, Imaging, Otologi, Oftalmologi	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS NEUROLOGI - NEUROVASKULAR, INTERVENSI, OTOLOGI PENICITRAAN, OFTALMOLOGI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
19	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Hematologi-Onkologi Medik	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - HEMATOLOGI ONKOLOGI MEDIK	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
20	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Obgyn-Onkologi Ginekologi (KOnk)	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI - ONKOLOGI GINEKOLOGI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
21	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam-Ginjal Hipertensi	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM - GINJAL HIPERTENSI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
22	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Anestesi-Intensif Care/ICU	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF - TERAPI INTENSIF	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
23	Dokter Ahli Muda - Dokter Sub Spesialis Bedah Saraf-Vaskular	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SUBSPESIALIS BEDAH SARAF - BEDAH SARAF NEUROVASKULAR	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
24	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SPELIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
25	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Urologi	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SPELIALIS UROLOGI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
26	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	DOKTER SPELIALIS ANESTESI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
27	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa atau Psikiatri	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SPELIALIS KEDOKTERAN JIWA / SPELIALIS PSIKIATRI	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
28	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   DOKTER	SPELIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	Memiliki STR Dokter Spesialis Sesuai Jenis Spesialisnya
29	Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI EPIDEMIOLOGI)	
30	Fisikawan Medis Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   FISIKAWAN MEDIS	S-1 FISIKA (MINAT FISIKA MEDIS) / S-1 TEKNIK NUKLIR (MINAT FISIKA MEDIS) / PROFESI FISIKA MEDIK / PROFESI FISIKAWAN MEDIK	
31	Fisioterapis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	Memiliki STR
32	Nutrisisionis Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   NUTRISIONIS	S-1 GIZI / D-IV GIZI KLINIK / D-IV GIZI / S-1 ILMU GIZI	
33	Okupasi Terapis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   OKUPASI TERAPI	D-III TERAPI OKUPASI / D-III OKUPASI TERAPI	Memiliki STR

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
34	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (KONSENTRASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
35	Penata Anestesi Ahli Pertama	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   PENATA ANESTESI	D-IV KEPERAWATAN ANESTESILOGI / D-IV PENATA ANESTESI / D-IV KEPERAWATAN ANESTESI REANIMASI	Memiliki STR
36	Perekam Medis Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   PEREKAM MEDIK	D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMATIKA KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III REKAM MEDIS / D-III ILMU REKAM MEDIS	Memiliki STR
37	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAPAI	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
38	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DADOK TUNGGUL HITAM	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
39	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BELIMBING	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
40	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ANAK AIR	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
41	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ULAK KARANG	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
42	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAUH	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
43	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNGUS	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
44	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AIR TAWAR	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
45	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LUBUK BUAYA	D-III ANALIS KESEHATAN	Memiliki STR
46	Psikolog Klinis Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL	PROFESI PSIKOLOGI (KASUISTIKA PSIKOLOGI KLINIS) / S-1 PSIKOLOGI + PROFESI PEMINATAN PSIKOLOGI KLINIS / S-1 PSIKOLOGI + PENGUKUHAN PSIKOLOG KLINIS	Memiliki STR
47	Radiografer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III RADIOLOGI / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RADIOLOGI / D-III TEKNIK RONTGEN	Memiliki STR
48	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS / SARJANA SAINS TERAPAN TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV TEKNIK ELEKTROMEDIK / D-IV SAINS TERAPAN TEKNIK ELEKTROMEDIK / SARJANA SAINS TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTROMEDIS	Memiliki STR
49	Teknisi Transfusi Darah Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH / D-III TEKNOLOGI BANK DARAH / D-III TRANSFUSI DARAH	Memiliki STR
50	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN) / D-IV PROMOSI KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (MINAT PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU)	
51	Terapis Wicara Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL	D-III TERAPI WICARA	Memiliki STR

#### B. TENAGA TEKNIS

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Pendidikan Nama	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
		418	10			
1	Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PARIWISATA   BIDANG PEMASARAN	S-1 PARIWISATA / D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / D-IV DESTINASI PARIWISATA / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV SENI PERTUNJUKAN / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 KEWIRAUSAHAAN	
2	Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PARIWISATA   BIDANG EKONOMI KREATIF	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 PARIWISATA / D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV DESTINASI PARIWISATA / D-IV SENI PERTUNJUKAN	
3	Adyatama Kepariwisataa dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PARIWISATA   BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK PARIWISATA	D-IV BISNIS DIGITAL PARIWISATA / D-IV DESAIN MEDIA / D-IV DESTINASI PARIWISATA / D-IV SENI PERTUNJUKAN / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 PARIWISATA	
4	Analisis Hukum Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM	
5	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG OPERASI DAN SARANA PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI	
6	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PROTEKSI DAN PENGUJIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI	
7	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	S-1 GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 MANAJEMEN BENCANA / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEAWATDARURATAN	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
8	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	S-1 GEOGRAFI / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEOLOGI	
9	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 LOGISTIK	
10	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG KOMSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 LOGISTIK	
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH   SUB BIDANG PENILAIAN, PEMINDAHTANGAN DAN PENGHAPUSAN ASET	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 EKONOMI / S-1 STATISTIKA	
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH   SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN PAJAK	
13	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN   SUB BIDANG KEBERATAN DAN PENGURANGAN	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 STATISTIKA	
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SEKRETARIAT	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 STATISTIKA	
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH   SUB BIDANG PENGELUARAN	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 STATISTIKA	
16	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH   SUB BIDANG AKUNTANSI	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN PAJAK	
17	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN   SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 STATISTIKA	
18	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	S-1 KELAUTAN / S-1 PERIKANAN	
19	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	
20	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	S-1 AGRIBISNIS / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	
21	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN	D-III PETERNAKAN	
22	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	D-III PERTANIAN	
23	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	
24	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI	S-1 DESAIN PRODUK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 LOGISTIK / S-1 STATISTIKA	
25	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	S-1 DESAIN PRODUK / S-1 EKONOMI / S-1 LOGISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA	
26	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING	S-1 EKONOMI / S-1 DESAIN PRODUK / S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 LOGISTIK	
27	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	D-IV PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	
28	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	
29	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
30	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	
31	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN   SUBBAGIAN UMUM	D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 MANAJEMEN	
32	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	
33	Arsiparis Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KERJASAMA	D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	
34	Arsiparis Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG KEARSIPAN	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 KEARSIPAN	
35	Arsiparis Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PEMBINAAN	S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 KEARSIPAN	
36	Arsiparis Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 KEARSIPAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / D-IV KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI	
37	Arsiparis Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT	S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL / D-IV KEARSIPAN / S-1 KEARSIPAN / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM	
38	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
39	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
40	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
41	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
42	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
43	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
44	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
45	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
46	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
47	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
48	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
49	Arsiparis Terampil		1	Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
50	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
51	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG UTARA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
52	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
53	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   SEKRETARIAT	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
54	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN LUBUK KILANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
55	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
56	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
57	Arsiparis Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM sekretariat dprd   SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
58	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	
59	Arsiparis Terampil	1	1	Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   ARSIPARIS	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
60	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
61	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	
62	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEUANGAN	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
63	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   - UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
64	Arsiparis Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI BISNIS / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK	
65	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR	S-1 PSIKOLOGI	Sertifikat lulus uji kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar
66	Asisten Pelatih Olahraga Pemula	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA   BIDANG OLAHRAGA	SLTA/SMA SEDERAJAT	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Memiliki Prestasi di Bidang Olahraga dibuktikan dengan Sertifikat atau Sejenisnya. 3. Pernah mengikuti ajang olah raga minimal PORDA dibuktikan dengan piagam atau medali.
67	Auditor Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU IV	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	
68	Auditor Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU II	D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III MANAJEMEN	
69	Auditor Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU I	D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN	
70	Auditor Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU III	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN KEUANGAN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	
71	Auditor Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	D-III ADMINISTRASI PAJAK / D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN / D-III AKUNTANSI / D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN PAJAK / D-III MANAJEMEN KEUANGAN	
72	KONSELOR SDM	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING / S-1 PSIKOLOGI	Sertifikat lulus uji kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar
73	KONSELOR SDM	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT	S-1 PSIKOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	Sertifikat lulus uji kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar
74	KONSELOR SDM	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	Sertifikat lulus uji kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar
75	KONSERVATOR	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN	S-1 ARKEOLOGI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 GEOLOGI	
76	KURATOR	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 ARKEOLOGI / S-1 ILMU SEJARAH	
77	Mangala Informatika Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN DAERAH	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 TEKNIK ELEKTRO	
78	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / D-IV RELASI INDUSTRI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	
79	Medik Veteriner Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   UPTD RUMAH POTONG HEWAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD RUMAH POTONG HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	
80	Medik Veteriner Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROFESI DOKTER HEWAN	
81	Medik Veteriner Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	PROFESI DOKTER HEWAN	
82	OPERATOR ALAT BERAT	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPTD TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH DAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA   TU UPT TPA SAMPAH DAN IPLT	SLTA SEDERAJAT	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat, 2. Memiliki Sertifikat Pelatihan Dasar Pengoperasian Alat Berat
83	OPERATOR ALAT BERAT	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   UPT PERALATAN DAN ALAT BERAT   SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PERALATAN DAN ALAT BERAT	SLTA SEDERAJAT	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat, 2. Memiliki Sertifikat Pelatihan Dasar Pengoperasian Alat Berat

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
84	Pamong Budaya Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN	S-1 SEJARAH / S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM / S-1 ANTROPOLOGI	
85	Paramedik Veteriner Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   UPTD RUMAH POTONG HEWAN   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD RUMAH POTONG HEWAN	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	
86	Paramedik Veteriner Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER	
87	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS SOSIAL   BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
88	Pekerja Sosial Ahli Pertama		1	Pemerintah Kota Padang   DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
89	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS SOSIAL   BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
90	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
91	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA   BIDANG OLAHRAGA	S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA / S-1 MANAJEMEN OLAHRAGA / S-1 REKAYASA KEOLAHRAGAAN / S-1 SAINS KEOLAHRAGAAN	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Memiliki Prestasi di Bidang Olahraga dibuktikan dengan Sertifikat atau Sejenisnya. 3. Pernah mengikuti ajang olah raga minimal PORDA dibuktikan dengan piagam atau medali.
92	Pembina Industri Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI / S-1 HUKUM	
93	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	S-1 ILMU GIZI / S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / S-1 ILMU PANGAN	
94	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 PLANOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL	
95	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   - UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 HUKUM	
96	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG KESELAMATAN DAN OPERASIONAL   SEKSI PENEGAKAN HUKUM	S-1 HUKUM	
97	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 AKUAKULTUR / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	
98	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 PERIKANAN / S-1 AKUAKULTUR / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	
99	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   UPT BALAI BENIH IKAN   TATA USAHA BALAI BENIH IKAN	S-1 AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 PERIKANAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	
100	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	S-1 AKUAKULTUR / S-1 PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN	
101	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 GIZI / S-1 KEBIDANAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 PSIKOLOGI	
102	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN		1	Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG UTARA   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
103	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
104	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN NANGGALO   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
105	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN KOTO TANGAH   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
106	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN LUBUK KILANGAN   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
107	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
108	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG BARAT   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
109	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN KURANJI   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
110	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN LUBUK BEGALUNG   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
111	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PAUH   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
112	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG SELATAN   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
113	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG TIMUR   SEKSI TATA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	
114	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PROGAM, PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR	
115	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	
116	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 ARSITEKTUR	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
117	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR	
118	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN   BIDANG PERUMAHAN	S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI	
119	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
120	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
121	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH   SUB BIDANG AKUNTANSI	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
122	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
123	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
124	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH   SUB BIDANG PENATAANUSAHAAN DAERAH	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
125	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
126	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH   SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
127	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
128	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG E-GOVERNMENT	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
129	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   SUB BIDANG PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN ASET	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
130	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
131	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
132	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
133	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
134	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANAHAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
135	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PARIWISATA   BIDANG PROGRAM	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
136	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH   SUB BIDANG PENGELUARAN	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
137	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PARIWISATA   BIDANG EKONOMI KREATIF	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
138	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PARIWISATA   BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK PARIWISATA	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
139	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN DAERAH	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
140	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS   SEKSI PRASARANA FASILITAS LALU LINTAS	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	
141	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH   SUB BIDANG PELAPORAN	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
142	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	D-IV SOSIOLOGI / S-1 ILMU KELUARGA / S-1 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 PSIKOLOGI (SPECIALISASI ANAK-REMAJA-KELUARGA) / S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
143	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN, DAN PENGGERAKAN	S-1 ILMU KELUARGA / S-1 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN / D-IV SOSIOLOGI / S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 PSIKOLOGI (SPECIALISASI ANAK-REMAJA-KELUARGA) / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
144	PENATA KEPROTOKOLAN	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUB BAGIAN PROTOKOL	D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KOMUNIKASI MASSA / D-IV STUDI KEBUJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	
145	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANAHAN   BIDANG GANTI KERUGIAN DAN PENATAGUNAAN TANAH	D-III GEOGRAFI / D-III GEOMATIKA / D-III PEMETAAN / D-III PENGUKURAN / D-III PERTANAHAN / D-III PLANOLOGI / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA	
146	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANAHAN   BIDANG PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN	D-III GEOGRAFI / D-III PEMETAAN / D-III GEOMATIKA / D-III PERENCANAAN WILAYAH KOTA / D-III PERTANAHAN / D-III PLANOLOGI / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III TEKNIK SIPIL / D-III PENGUKURAN	
147	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN	D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III ARSITEKTUR / D-III PLANOLOGI / D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL	
148	Penata Perizinan Ahli Pertama	4		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM BISNIS / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	
149	PENATA SARANA DAN PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	SMK PERIKANAN / SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN / SMK PELAYARAN	
150	Peneliti Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-2 PARIWISATA / S-2 BISNIS DIGITAL / S-2 MANAJEMEN DAN KEWIRUSAHAAN / S-2 PERENCANAAN KEPARIWISATAAN / S-2 ILMU PERIKANAN	
151	Penera Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG KEMETROLOGIAN	S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO	
152	Penera Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG KEMETROLOGIAN	D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI / D-III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI	
153	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KERJASAMA	S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 BAHASA INGGRIS	Sertifikat TOEFL atau sejenisnya dengan minimal skor 500 yang dikeluarkan rentang tahun 2020-2024
154	Pengantar Kerja Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	
155	Pengantar Kerja Ahli Pertama	1	1	Pemerintah Kota Padang   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	
156	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	
157	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 PRODUKSI PETERNAKAN	
158	Pengawas Bibit Ternak Terampil	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN	D-III BUDIDAYA PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PRODUKSI TERNAK / D-III TEKNIS REPRODUKSI SATWA	
159	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG KEMETROLOGIAN	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI	
160	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH   BIDANG PENGAWASAN KOPERASI	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM	
161	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH   BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM	
162	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN	S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU GEOGRAFI	
163	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	5		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU GEOGRAFI	
164	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 GEOGRAFI / S-1 ILMU GEOGRAFI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
165	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN	S-1 ILMU TANAH / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN	
166	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN / S-1 ILMU PANGAN / S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN	
167	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN	D-IV PENYULUH PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN / S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN / S-1 ILMU PETERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK	
168	Pengawas Mutu Pakan Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN	D-III PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK	
169	Pengawas Mutu Pakan Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   UPTD PEMBIBITAN TERNAK	D-III PETERNAKAN / D-III PRODUKSI TERNAK	
170	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU I	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK	
171	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU II	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
172	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama		1	Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	
173	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU III	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 STUDI PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK	
174	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	2		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUB BAGIAN PROTOKOL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN	
175	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP	D-III KELAUTAN / D-III PERIKANAN	
176	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	D-III ANALIS KESEHATAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN / D-III GIZI	
177	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER	
178	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP	S-1 PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN / S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP	
179	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH   BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	S-1 MANAJEMEN / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INDUSTRI	
180	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	
181	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	
182	PENGENDALI KONTEN INTERNET	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 MANAJEMEN TEKNOLOGI	
183	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	
184	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) / S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN	
185	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SMK PERTANIAN	
186	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN	SMK PERTANIAN	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
187	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   UPT Balai Pembibitan dan Agrowisata   SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI PEMBIBITAN DAN AGROWISATA	SMK PERTANIAN	
188	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG SELATAN   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
189	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PAUH   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	
190	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
191	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
192	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA, DATA, DAN INFORMASI	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
193	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN NANGGALO   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
194	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN KURANJI   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
195	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG UTARA   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
196	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN LUBUK BEGALUNG   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
197	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN LUBUK KILANGAN   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
198	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG BARAT   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
199	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	
200	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN KOTO TANGAH   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
201	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN PADANG TIMUR   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	
202	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR   SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGUJIAN KEND.BERMOTOR	SMK TEKNIK	
203	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PROGAM, PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEJAHTERAAN LINGKUNGAN	
204	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL / S-1 HUKUM BISNIS	
205	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN   BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 HUKUM BISNIS / S-1 KEWIRAUSAHAAN / S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL	
206	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	5		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PENYULUHAN	D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN	
207	Penyuluh Pertanian Terampil	4		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   BIDANG PENYULUHAN	D-III AGRIBISNIS / D-III AGROEKOTEKNOLOGI / D-III AGRONOMI / D-III AGROTEKNOLOGI / D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / D-III ILMU TANAH / D-III PEMULIAAN TANAMAN / D-III PENYULUHAN PERTANIAN / D-III PERKEBUNAN / D-III TEKNIK PERTANIAN	
208	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1	1	Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN, PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEHUMASAN	S-1 HUKUM	
209	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM	
210	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
211	Perencana Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 ARSITEKTUR / S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK SIPIL	
212	Perencana Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI FISKAL / S-1 KEWIRAUUSAHAAN / S-1 EKONOMI SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN / D-IV DESTINASI PARIWISATA / S-1 PARIWISATA	
213	Perencana Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK SIPIL	
214	Perencana Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN KONTRAK PEMERINTAH / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	
215	POLISI KHUSUS CAGAR BUDAYA	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Sertifikat Beladiri/Sertifikat Pelatihan Dasar yang dikeluarkan rentang waktu 2016-2024
216	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	20		Pemerintah Kota Padang   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Sertifikat Beladiri/Sertifikat Pelatihan Dasar yang dikeluarkan rentang waktu 2016-2024
217	Polisi Pamong Praja Terampil	35		Pemerintah Kota Padang   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III BAHASA INGGRIS / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat 2. Sertifikat Beladiri/Sertifikat Pelatihan Dasar yang dikeluarkan rentang waktu 2016-2024
218	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   JABATAN FUNGSIONAL   PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	
219	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KERJASAMA	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA	
220	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA	
221	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA	
222	Pranata Komputer Ahli Pertama	5		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN   SUBBAGIAN UMUM	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA	
223	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
224	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
225	Pranata Komputer Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
226	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEUANGAN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
227	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
228	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
229	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
230	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
231	Pranata Komputer Terampil		1	Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
232	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI ASN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
233	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
234	Pranata Komputer Terampil		1	Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   SEKRETARIAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
235	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
236	Pranata Komputer Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
237	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   - PENYUSUNAN PROGRAM	D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
238	Pranata Komputer Terampil	1	1	Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS   SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
239	Pranata Komputer Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
240	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN LUBUK KILANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
241	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KESEHATAN   UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN   BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN   SUBBAGIAN UMUM	D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
242	Pranata Komputer Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
243	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
244	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM	D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
245	Pranata Komputer Terampil	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERTANIAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
246	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SISTEM INFORMASI	
247	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERIKANAN DAN PANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
248	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
249	Pranata Komputer Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	
250	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, DAN INFORMASI ASN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN	
251	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN	
252	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT	D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
253	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	2		Pemerintah Kota Padang   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA	
254	Pustakawan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PEMBINAAN	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	

No	Nama Jabatan	Jumlah Formasi		Unit Penempatan	Kualifikasi Pendidikan	Syarat Wajib Tambahn
		Umum	Disabilitas			
255	Pustakawan Ahli Pertama	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PERPUSTAKAAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM / S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI / S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	
256	Sandiman Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN DAERAH	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER / D-IV REKAYASA KRIPTOGRAFI / D-IV REKAYASA PERANGKAT KERAS KRIPTOGRAFI / S-1 REKAYASA KOMPUTER / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN	
257	Statistisi Ahli Pertama	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN DAERAH	S-1 MATEMATIKA / S-1 SAINS DATA / S-1 STATISTIKA / D-IV SAINS DATA TERAPAN	
258	Surveyor Pemetaan Terampil	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG ANGKUTAN	D-III TEKNOLOGI GEOMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III SURVEI DAN PEMETAAN / D-III TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN / D-III TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH	
259	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPTD TEMPAT PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH DAN INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA   TU UPT TPA SAMPAH DAN IPLT	S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK OTOMOTIF / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT / S-1 TEKNIK ELEKTRO	
260	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	3		Pemerintah Kota Padang   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK OTOMOTIF / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT	
261	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	2		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG OPERASI DAN SARANA PRASARANA	S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK OTOMOTIF / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT	
262	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	1		Pemerintah Kota Padang   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG PENYELENGGARAAN JALAN	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT / D-IV TEKNIK OTOMOTIF	



WALI KOTA PADANG

ANDREE HARMADI ALGAMAR

## LAMPIRAN II FORMAT SURAT LAMARAN

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Yth. Bapak Wali Kota Padang  
Cq. Kepala BKPSDM Kota Padang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jabatan Yang Dilamar :  
    Nama Jabatan :  
    Rencana Penempatan :  
Alamat Domisili :

dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat menjadi Calon Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan hasil *scan* dokumen asli sesuai dengan ketentuan pada pengumuman sebagai berikut.

1. surat lamaran;
2. kartu tanda penduduk (KTP);
3. surat pernyataan diri;
4. ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan;
5. transkrip nilai;
6. pas foto;
7. dokumen lain sesuai persyaratan jabatan; \*)
8. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat disabilitas yang dialami.\*\*)

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi pengadaan ASN Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai  
10.000

(Nama Lengkap)

\*) berkas nomor 7 hanya berlaku bagi jabatan yang mensyaratkan dokumen wajib tambahan

\*\*\*) berkas nomor 8 hanya berlaku bagi pelamar penyandang disabilitas

\*) dan \*\*) dapat dihilangkan jika

## LAMPIRAN III FORMAT SURAT PERNYATAAN 10 POIN

### SURAT PERNYATAAN DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Status Perkawinan :  
Agama :  
Alamat Sesuai KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya.

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia digugurkan/dibatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi penerimaan ASN Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2024.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Yang membuat pernyataan,

Materai  
10.000

(Nama Lengkap)

*Catatan:*

*Poin pada nomor 1 hingga 10 wajib termuat seluruhnya dan dituliskan secara urut. Apabila ada poin yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan keikutsertaannya dalam seleksi penerimaan ASN Tahun Anggaran 2024.*